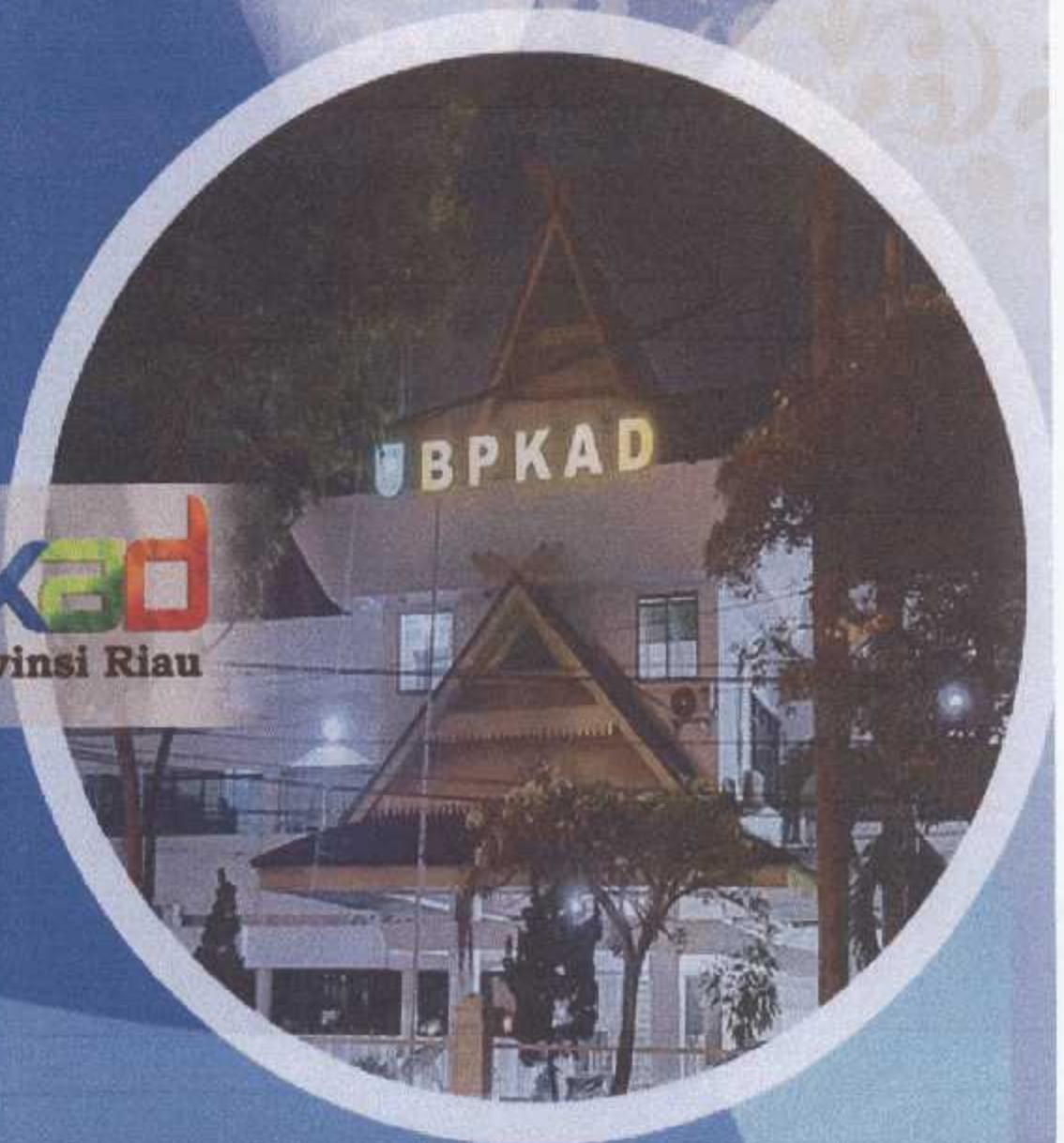




**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**

bpkad
Provinsi Riau



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia dan Bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPKAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan tahunan ini merupakan rangkuman kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Riau sepanjang tahun 2022.

BPKAD Provinsi Riau selaku Badan Publik memiliki tanggungjawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas BPKAD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2022.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk masukan, saran dan kritik demi penyempurnaan laporan berikutnya. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022.

Pekanbaru, 2 Januari 2023

Atasan PPID Pembantu
Kepala BPKAD Provinsi Riau



INDRA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.2. Struktur PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau.....	2
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	7
2.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	9
2.4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	9
Bab III : Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	14
3.1. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai.....	14
3.2. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	15
3.3. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik.....	16
3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Dan Ditolak.....	17
Bab IV : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	18
Bab V : Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	19
5.1. Kendala Eksternal.....	19
5.2. Kendala Internal.....	19
Bab VI : Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	21
Bab VII : Penutup.....	22
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Informasi Publik Yang dikuasai	15
Tabel 2 : Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022	16
Tabel 3 : Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik.....	17
Tabel 4 : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau.....	3
Gambar 2 : Link/Tautan PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau.....	4
Gambar 3 : Link/Tautan DIP BPKAD Prov. Riau pada portal PPID Riau.....	5
Gambar 4 : Pojok Layanan Informasi PPID Pembantu BPKAD Prov. Riau .	
5 Gambar 5 : Media Sosial PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau.....	6
Gambar 6 : Bagan Alur Permohonan Informasi	7
Gambar 7 : Visitasi Komisi Informasi Prov. Riau ke BPKAD Prov. Riau	12
Gambar 8 : Penghargaan KI Riau Award Tahun 2022	13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam UU KIP, telah diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik, diantaranya yaitu: wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau menjalankan kewenangannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 ayat 1 huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Regulasi dan kebijakan tersebut di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada BPKAD Provinsi Riau dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Pembantu menyusun Laporan tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau selama tahun 2021 dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

1.2. Struktur PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan komitmen BPKAD Provinsi Riau untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka Kepala BPKAD Provinsi Riau selaku atasan PPID Pembantu BPKAD telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan Keputusan Nomor: Kpts.24/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran.

PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dilaksanakan oleh Sekretaris BPKAD dan dibantu oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu, Kepala Bidang Anggaran Daerah selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Koordinator Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi serta Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Bidang

Penyelesaian Sengketa Informasi. Adapun struktur organisasi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

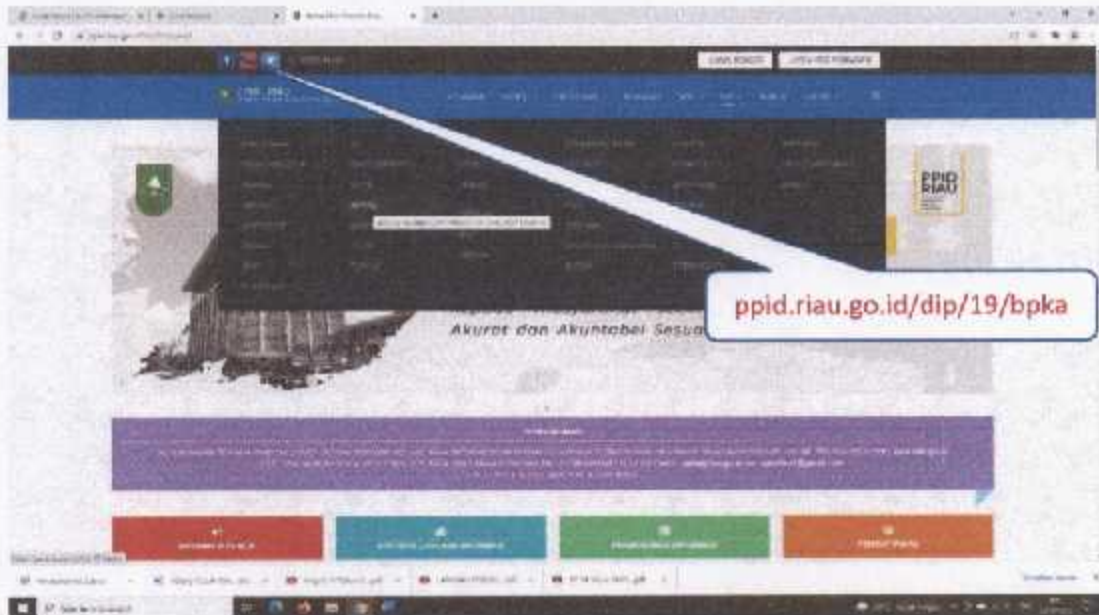
PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Pengelolaan layanan Informasi Publik di BPKAD Provinsi Riau meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, BPKAD Provinsi Riau memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui website <http://bpkad.riau.go.id/dan> <https://ppid.riau.go.id/dip/19/bpkad>. Dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Gambar 2 : Link/Tautan PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau



Gambar 3 : Link/Tautan DIP BPKAD Prov. Riau pada portal PPID Riau



Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui beberapa cara yaitu pertama, melalui tatap muka dengan cara mengajukan secara langsung (datang ke Kantor BPKAD Provinsi Riau). BPKAD Provinsi Riau menyediakan "Pojok Layanan Informasi Publik" sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung. Pojok Layanan Informasi Publik merupakan *Help Desk* PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau yang berada di Lobby Kantor BPKAD Provinsi Riau.

Gambar 4 : Pojok Layanan Informasi PPID Pembantu BPKAD Prov. Riau



Pada ruang layanan ini tersedia fasilitas meja, kursi, televisi dan dilengkapi dengan informasi alur permohonan informasi, struktur organisasi PPID Pembantu dan Maklumat Pelayanan. Secara bertahap fasilitas ruang Pojok Layanan Informasi akan dilengkapi dengan Daftar Informasi dan sarana prasarana kerja sesuai kebutuhan. Mengingat keterbatasan ruangan dan ketersediaan sarana prasarana yang belum terpenuhi secara lengkap pada ruang layanan, maka permintaan informasi juga dilayani di ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu.

Selain melalui tatap muka, pelayanan informasi juga dilakukan melalui email : bpkadriau@gmail.com dan melalui sarana media social Instagram <https://www.instagram.com/bpkad.riau/> dan facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070512407376>. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui komunikasi email dan media sosial tersebut.

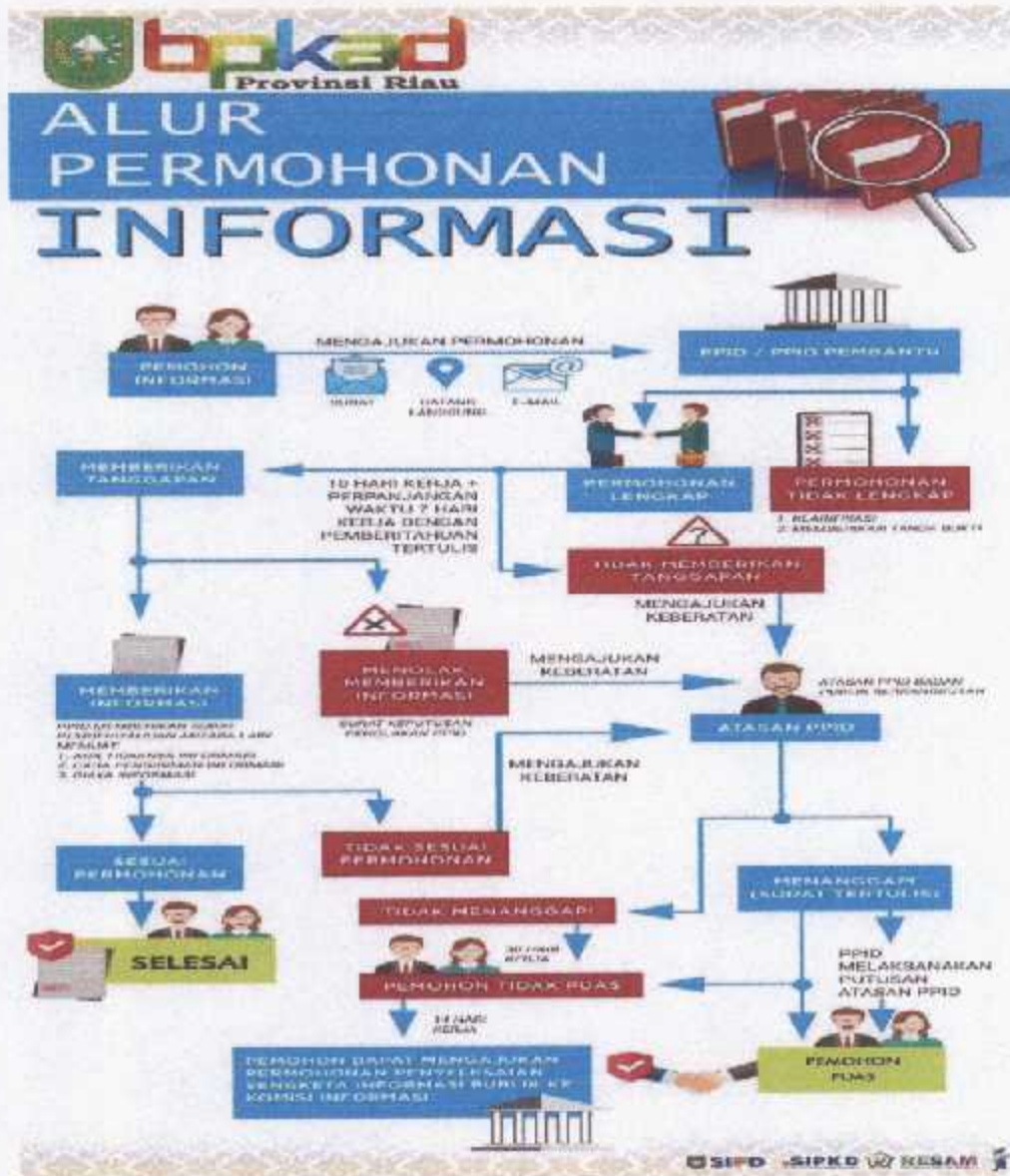
Gambar 5 : Media Sosial PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau



Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau untuk

mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Mekanisme alur memperoleh informasi dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 6 : Bagan Alur Permohonan Informasi



2.2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang memiliki masing-masing

tugas sesuai dengan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Riau Nomor: Kpts.24/III/2020 tentang Penunjukan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jumlah SDM tersebut, dianggap sudah ideal walaupun dengan anggaran dan sarana prasarana yang terbatas.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Riau tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD selaku Atasan PPID Pembantu. Secara umum PPID Pembantu memiliki tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik di lingkungan BPKAD Provinsi Riau pada setiap bidang.

PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Adapun uraian tugas PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi
- b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi
- c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
- e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik
- f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi

2. Bidang Pengolahan dan Klasifikasi informasi

Bidang Pengolahan dan Klasifikasi informasi, memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program bidang
- b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik
- c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
- d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi

3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
- c. melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi
- d. melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi/ informasi

2.3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi di lingkup BPKAD Provinsi Riau dilaksanakan sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Provinsi Riau. Dukungan anggaran pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dialokasikan pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah sebesar Rp 660.681.150,- dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 660.636.744,- .

Secara umum anggaran tersebut antara lain dipergunakan untuk biaya pemeliharaan perangkat keras dan jaringan, pembayaran biaya langganan internet, makan minum rapat, dan lain sebagainya.

2.4. PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau didukung oleh tim kerja yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. Seluruh tim PPID Pembantu saling bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan kualitas layanan informasi dilakukan antara lain melalui pemutakhiran website dan *updating* data, partisipasi aktif dalam setiap kegiatan PPID Utama, Koordinasi dengan OPD dan Lembaga terkait dalam rangka penyebarluasan informasi publik, serta upaya perbaikan internal melalui penerimaan kunjungan tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

- a. Pemutakhiran Website BPKAD Provinsi Riau

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan maupun media informasi, BPKAD Provinsi Riau memperbaharui informasi data dan dokumentasi yang termuat dalam website bpkad.riau.go.id.

Pembaharuan yang dilakukan antara lain dengan *updating* data transparansi keuangan daerah. Pemutakhiran data transparansi keuangan daerah meliputi informasi dan data-data Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rekapitulasi Barang Milik Daerah.

b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) bertujuan sebagai panduan bagi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Disamping itu, Penyajian Daftar Informasi Publik juga dimaksudkan sebagai sarana yang diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk memperoleh data yang dapat diakses secara terbuka.

Dalam penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 dilaksanakan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas DIP tahun sebelumnya, dan selanjutnya disajikan Daftar Informasi Publik sesuai dengan data dan dokumen terbaru. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari beberapa jenis informasi, diantaranya:

- Informasi tentang profil BPKAD Provinsi Riau
- Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- Ringkasan laporan keuangan
- Ringkasan laporan akses informasi publik
- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

Daftar Informasi Publik BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

- c. Kontribusi dalam Kegiatan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik
PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau merupakan salah satu organisasi PPID Pembantu yang diikutsertakan dalam penilaian mandiri keterbukaan informasi publik (*Self Assesment Question*). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2022. Pada tahun 2022 ini pengisian dan penyerahan Formulir SAQ BPKAD Provinsi Riau dilakukan melalui online dengan situs <https://bit.ly/SAQ-opd> dan pengiriman Hardcopy SAQ Monev Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta dokumen pendukungnya ke Komisi Informasi Provinsi Riau pada tanggal 22 Agustus 2022

- d. Visitasi Tim Komisi Informasi Provinsi Riau

Pada bulan Oktober 2022, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau menerima kunjungan visitasi Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Komisioner KPI Provinsi Riau, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau dan Staf Seksi Komunikasi Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

Dalam kunjungan monev tersebut sekaligus mengkonfirmasi pengisian Self Assesment Questioner (SAQ) yang telah disampaikan sebelumnya kepada Komisi Informasi Provinsi Riau. Berikut adalah dokumentasi pada saat Tim

Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan monitoring dan evaluasi penilaian di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Riau.

Gambar 7 : Visitasi Komisi Informasi Prov. Riau ke BPKAD Prov. Riau



e. Rapat-rapat koordinasi internal tim PPID Pembantu

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan semangat tim PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau, maka secara berkala maupun insidental dilakukan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian tugas-tugas PPID Pembantu.

Rapat-rapat tim juga juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, sehingga dapat diketahui

kendala dan permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah.

f. Penghargaan

BPKAD Provinsi Riau meraih piagam Penghargaan KI Riau Award 2022 sebagai Peringkat Menuju Informatif (Katagori PPID Pembantu Provinsi Riau). Piagam tersebut diberikan dalam ajang Pemeringkatan dan Penganugerahan Badan Publik se-Provinsi Riau yang ditaja oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Gambar berikut adalah dokumentasi kegiatan pencapaian yang diraih PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau.

Gambar 8 : Penghargaan KI Riau Award Tahun 2022



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi publik di BPKAD Provinsi Riau secara umum belum terpusat di PPID, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bidang dan Sekretariat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung/bertatap muka ke Ruang PPID Pembantu dengan memberi penjelasan tentang jawaban yang didapat kepada pemohon. Dengan kapasitas ruangan dan pengarsipan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1 (satu), maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh *softcopy* bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk *softcopy*. Selain bertatap muka, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs website *bpkad.riau.go.id*.

3.1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Daftar Informasi Publik yang dikuasai adalah hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Riau yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai BPKAD Provinsi Riau, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah Informasi Publik yang Dikuasai PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Informasi Publik Yang dikuasai

No	Tipe Dokumen	Jumlah
1	Program Kegiatan	8
2	Kinerja	4
3	Laporan keuangan	1
4	Keterbukaan Informasi	23
5	Produk peraturan/kebijakan	8

3.2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dalam tahun 2022, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau menerima permohonan informasi publik sebanyak 2 (dua) pemohon, sebagai berikut :

1. FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Provinsi Riau.

Permohonan informasi Publik dari FITRA RIAU disampaikan ke BPKAD Provinsi Riau melalui PPID Utama Provinsi Riau dengan Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau Nomor: 042/PPID.R/OPD/04 Tanggal 02 Maret 2022 yang diterima oleh BPKAD Provinsi Riau pada tanggal 07 Maret 2022. Permohonan informasi dimaksud berupa Salinan dokumen informasi tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

Atas permohonan informasi tersebut, PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau telah menindaklanjuti dan menyampaikan Salinan dokumen dimaksud dengan surat Nomor 800/BPKAD-SEKR/280 Tanggal 09 Maret 2022.

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Permohonan informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau Nomor: 048/Diskominfotik-STTK/0302 Tanggal 05 Juli 2022 yang diterima oleh BPKAD Provinsi Riau melalui media WhatsApp Permohonan informasi yang diajukan berupa permintaan data untuk perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2022.

Atas permohonan informasi tersebut, BPKAD Provinsi telah menyampaikan data yang diminta melalui media WhatsApp Tanggal 13 Juli 2022.

Adapun rekapitulasi permohonan informasi selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2. Daftar permohonan informasi yang disampaikan ke BPKAD Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2. Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Pebruari	0
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
	Jumlah	2

3.3. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP *juncto* Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau selalu berupaya untuk tidak

melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan informasi yang diajukan ke PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau.

Berdasarkan data surat permohonan informasi yang diterima dan jawaban/tanggapan permohonan informasi publik yang telah diregister, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau memberikan jawaban atas permohonan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 2-8 Hari Kerja, sebagaimana dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3. Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Pemohon	Tanggal Permohonan	Hal Permohonan	Tanggal Jawaban	Keterangan
FITRA RIAU	07 Maret 2022	Permohonan informasi DPA-SKPD Tahun 2022	09 Maret 2022	2 hari kerja
BPS RIAU	05 Juli 2022	Data untuk perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2022	13 Juli 2022	8 hari kerja

3.4. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam tahun 2022, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau menerima pengajuan permohonan informasi publik sebanyak 2 (dua) permohonan. Dari 2 (dua) permohonan tersebut, seluruhnya dikabulkan dan tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *tidak terdapat* Pengajuan Keberatan Yang Diterima, Tanggapan Atas Keberatan, Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Riau, Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi KI Provinsi Riau, Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan serta Hasil Keputusan Pengadilan dan Pelaksanaannya.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Penyelesaian Sengketa	Jumlah
1	Keberatan yang Diterima	NIHIL
2	Tanggapan Atas Keberatan	NIHIL
3	Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI Provinsi Riau	NIHIL
4	Hasil Mediasi dan/ata Keputusan Ajudikasi KI Provinsi Riau	NIHIL
5	Gugatan Diajukan ke Pengadilan	NIHIL
6	Hasil Keputusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	NIHIL

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat karena dihadapkan dengan kendala eksternal maupun internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

5.1 KENDALA EKSTERNAL

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pemberian layanan informasi publik diantaranya adalah materi permohonan informasi publik yang diajukan tidak jelas dan lengkap, sehingga petugas pelayanan harus mengkonfirmasi kembali substansi permohonan informasi kepada pemohon informasi.

5.2 KENDALA INTERNAL

Kendala internal dalam pelayanan informasi publik PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau, antara lain :

- a. Persepsi atau pemahaman diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi belum sama, sehingga menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik dan kurang efektifnya waktu pelayanan.

- b. Belum semua data dan informasi di *backup* dalam bentuk *softcopy* dan disimpan dalam ruang/space yang memadai karena belum adanya area dan akses pengamanan informasi secara khusus.
- c. Kontribusi tim dalam memberikan informasi terkait proses bisnis produk dan layanan PPID belum maksimal.
- d. Anggaran pengelolaan PPID masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan kompetensi petugas dan operasional pengumpulan data dan informasi.
- e. Belum dilakukannya pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi masyarakat terhadap layanan informasi publik PPID pembantu BPKAD Provinsi Riau sebagai parameter perbaikan kualitas pelayanan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara kontinu dan konsisten, PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan informasi, maka dirumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi PPID pembantu BPKAD Provinsi Riau, antara lain:


- a. Memberikan pemahaman kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data dan pemberian layanan informasi publik.
- b. Mereview, melengkapi, dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai maupun yang dikecualikan.
- c. Pemutakhiran data dan informasi yang terdapat di website maupun media sosial Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap dan terkini.
- d. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang cepat dan pasti.
- e. Peningkatan kompetensi petugas melalui kursus atau diklat terkait dengan pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
- f. Optimalisasi kinerja tim PPID pembantu melalui forum koordinasi secara berkala.
- g. Memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana sehingga fungsi *Help Desk* "Pojok Layanan Informasi Publik" dapat lebih optimal.

BAB VII
PENUTUP

Harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat merupakan tantangan yang harus diwujudkan oleh segenap pengelola informasi dan dokumentasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut, PPID Pembantu BPKAD berupaya untuk melakukan perbaikan layanan secara terus menerus dan berkesinambungan..

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup BPKAD Provinsi Riau.

PPID PEMBANTU
SEKRETARIS BPKAD PROVINSI RIAU



ISPAN S. SYAHPUTRA Hs.,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19720911 200604 1 003

SIGN HERE 

BAB VII
PENUTUP

Harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat merupakan tantangan yang harus diwujudkan oleh segenap pengelola informasi dan dokumentasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut, PPID Pembantu BPKAD berupaya untuk melakukan perbaikan layanan secara terus menerus dan berkesinambungan..

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup BPKAD Provinsi Riau.

PPID PEMBANTU
SEKRETARIS BPKAD PROVINSI RIAU



ISPAN S. SYAHPUTRA Hs.,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19720911 200604 1 003

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pegawai/Unit/Satker yang Menyerahkan dan Mengurus Informasi	Penanggung-jawab Pembuatan atau Pemberitaan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Penyediaan dan Pengumpulan Informasi)	Kategori Informasi					Jangka Waktu paman atau Referensi Arsip	Keterangan
							Wajib Dipublikasikan	Wajib Diumumkan	Wajib Tersedia	Informasi yang disediakan	Informasi yang disediakan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAM													
1. MONEV													
2.1	PEMBAHASAN TAHUNAN 2022	Informasi Pelaksanaan Kinerja BPKAD Tahun 2022	Sekretariat	Sub Koordinator Perencanaan Program	Bekasbaru, 2021	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>	
2.2	PERUBAHAN RENCANA RENCANA STRATEGIS BPKAD TAHUN 2019-2024	Informasi Perubahan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2019-2024	Sekretariat	Sub Koordinator Perencanaan Program	Bekasbaru, 2021	Hardcopy, Softcopy	✓				5 tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>	
2.3	RENJA TAHUN 2022	Informasi Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022	Sekretariat	Sub Koordinator Perencanaan Program	Bekasbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>	
2.4	Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2022	Informasi Ringkasan Kegiatan dan Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2022	Sekretariat	Sub Koordinator Perencanaan Program	Bekasbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>	

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Membuat dan Mengelola Informasi	Penanggung Jawab Pembinaan dan Pengembangan Informasi (Publitas)	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumpulan dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Diakses	Wajib Ditinjau	Wajib Diperbarui	Informasi yang Dibutuhkan	Informasi yang Tidak Dibutuhkan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	KETERBUKAAN INFORMASI												
7.1.	Penyerapan Anggaran SKPD Tahun 2022	Informasi penyerapan anggaran berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan	Bidang Perencanaan dan Kas Daerah	Kasubid Belanja	Pejabat Daerah, Pekanbaru, 2022	Digital Hardcopy, Softcopy	Y				1 Tahun	Website <i>site.riau.go.id</i> dan <i>bka.riau.go.id</i>	
7.2.	Data SP2D Tahun 2022	Informasi data rencana SP2D yang diterbitkan Kantor Sekretaris Umum Daerah Kabupaten Natar SPP, PKF dan SP2B	Bidang Perencanaan dan Kas Daerah	Kasubid Belanja	Pejabat Daerah, Pekanbaru, 2022	Digital	Y				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>	
7.3.	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Informasi publik berdasarkan insurksi Menteri, Disisi, Negeri Nomor 188.570/797/SI	Sekretariat/ Bidang	Seluruh Pejabat Struktural	Pejabat Daerah, Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	Y				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i> → (TRANSPARANSI ANGGARAN)	
7.3.1.	Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2022	Informasi ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran seluruh OPD Pemerintah Provinsi Riau	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pejabat Daerah, Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	Y				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i> → (TRANSPARANSI ANGGARAN)	
7.3.2.	Ringkasan RKA-PPRD Tahun 2022	Informasi ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintahan Provinsi Riau	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pejabat Daerah, Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	Y				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i> → (TRANSPARANSI ANGGARAN)	
7.3.3.	Raport tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pejabat Daerah, Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	Y				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i> → (TRANSPARANSI ANGGARAN)	

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menerbitkan dan Menguasai Informasi	Penanggung- jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Penggunaan- an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyim- panan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di- umumkan Secara Berkala	Wajib Di- umumkan Serta Merta	Wajib Terse- dia Setiap Saat	Informasi yang diketahui dan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.	Ringkasan RKA - PPKD Tahun 2022	Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran PPKD Tahun Anggaran 2022	Sekretariat	Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
2.6.	Ringkasan DPA - SKPD Tahun 2022	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Tahun 2022	Kepala BPKAD	Sub Koordinator Perencanaan Program	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
2.7.	Ringkasan DPA - PPKD Tahun 2022	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Tahun 2022	Kepala BPKAD	Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
2.8.	Rencana Aksi 2022	Informasi Rencana Aksi BPKAD Tahun Anggaran 2021	Sekretariat	Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menerbitkan dan Menguasai Informasi	Penanggung- jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumuman- an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyimp- panan atau Retensi Arsip	Keicraangan
							Wajib Di- umum- kan Secara Berkala	Wajib Di- umum- kan Serta Merita Merita	Wajib Terse- dia Setiap Saat	Informasi yang dibercuaf- kan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	KINERJA											
3.1.	Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2021	Informasi capaian kinerja tahunan BPKAD Tahun 2021	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan Program	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
3.2.	Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021	Informasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan Program	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
3.3.	Cascading BPKAD 2022	Informasi Penjabaran Kinerja BPKAD Tahun 2022	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan Program	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
3.4.	Peta Proses Bisnis BPKAD	Informasi Proses Bisnis BPKAD	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan Program	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				Selama dibentangkan	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
4.	LAPORAN KEUANGAN											
4.1.	Laporan Keuangan BPKAD Tahun 2021 (Audited)	Informasi Laporan Keuangan BPKAD (LRA, Neraca, LO, LPE) Audited Tahun 2021	Sekretaris	Sub Koordinator Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekabaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menerbitkan dan Mengawasi Informasi	Penanggung-jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumuman-an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyediaan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di-umumkan Secara Bertala	Wajib Di-umumkan Serta Merta	Wajib Tersedia Setiap Saat	Informasi yang dilecehkan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	KETERBUKAAN INFORMASI											
7.1.	Penyerapan Anggaran SKPD Tahun 2022	Informasi penyerapan anggaran berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan	Bidang Perencanaan dan Kas Daerah	Kasubbid Belanja	Pekanbaru, 2022	Digital, Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website sve.riau.go.id dan bkad.riau.go.id
7.2.	Data SP2D Tahun 2022	Informasi data rincian SP2D yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Nomor SPP, SPM dan SP2D	Bidang Perencanaan dan Kas Daerah	Kasubbid Belanja	Pekanbaru, 2022	Digital	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id
7.3.	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Informasi publik berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ	Sekretariat/Bidang	Seluruh Pejabat Struktural	Pekanbaru, 2022							
7.3.1.	Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2022	Informasi ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran seluruh OPD Pemerintah Provinsi Riau	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.3.2.	Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2022	Informasi ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.3.3.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Meubitkan dan Menguasai Informasi	Penanggung- jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumun- an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyimp- panan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di- umun- kan Secara Berhala	Wajib Di- umun- kan Serta Murni	Wajib Terse- dia Sesuai Saat	Informasi yang dileceh- kan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.3.4	Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang telah dievaluasi Kemandagri.	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.3.5	Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2022	Informasi ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran seluruh OPD Pemerintah Provinsi Riau	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.3.6	Ringkasan DPA-PPKD Tahun 2022	Informasi ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.3.7	LRA-SKPD Tahun 2021	Informasi realisasi anggaran seluruh OPD Pemerintah Provinsi Riau yang telah diaudit BPK-RI	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kasubbid Akuntansi dan Konsolidasi	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.3.9	LKPD Audited Tahun 2021	Informasi laporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Riau yang telah diaudit BPK-RI	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menerbitkan dan Mengumumkan Informasi	Penanggung- jawab Pembuatan atau Penciptaan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumuman- an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyimp- panan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di- umumkan Secara Berkala	Wajib Di- umumkan Serta Merta	Wajib Terse- di Setiap Suat	Informasi yang diketahui- kan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.3.10	Opini LKPD Tahun 2021	Informasi opini hasil audit laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kasubid Akuntansi dan Konsolidasi	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.4.	KUA Tahun 2022	Informasi Kebijakan Umum Anggaran/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran sebagai dasar penyusunan APBD	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.5.	PPAS Tahun 2022	Informasi prioritas dan plafon anggaran sementara/perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan APBD	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id → (TRANSPARANSI ANGGARAN)
7.6.	Ranpergub tentang penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022	Informasi penjabaran APBD Provinsi Riau setelah Ranperda tentang APBD mendapatkan persetujuan bersama DPRD	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id
7.7	Pakta Integritas 2022	Informasi Pakta Integritas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Bebas KKN	Sekretariat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menerbitkan dan Menguasai Informasi	Penanggung-jawab Pembuatan atau Pemberitaan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumpulan dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di-umumkan Secara Berhala	Wajib Di-umumkan Serta Merta	Wajib Tersebut Setiap Saat	Informasi yang dibacukan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.8.	Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022	Informasi penjabaran APBD Provinsi Riau setelah Gubernur menetapkan Perda tentang APBD	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id
7.9.	Daftar Aset Pemerintah Provinsi Riau	Informasi aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan kartu inventaris barang	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	
7.10.	Daftar Penghapusan Aset Pemerintah Provinsi Riau	Informasi penghapusan aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kasubbid Pemindahan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy		✓			Selama diberlakukan	
7.11.	Informasi tentang lelang barang milik daerah	Informasi lelang barang milik daerah	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kasubbid Pemindahan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy		✓			Selama diberlakukan	Website bpkad.riau.go.id Instagram @bpkad.riau
7.12.	Dokumentasi Kegiatan BPKAD Tahun 2022	Informasi dokumentasi berupa foto, link dari sosial media berkenaan dengan aktivitas rutinitas kegiatan BPKAD	Sekretariat	Kasubbag Urum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy					1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id Instagram @bpkad.riau
7.13.	Mandatori Alokasi APBD	Informasi Persentase APBD dalam hal pendidikan dan kesehatan dalam bentuk grafik	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Digital	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menerbitkan dan Menguasai Informasi	Pnanggung- jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumuman- an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyimin- panan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di- umumkan Secara Berkala	Wajib Di- umumkan Serta Merta Suat	Wajib Terse- dia Setiap Suat	Informasi yang dikecual- kan (Data Agregat dan Data Pribadi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.14	Infografis APBD 2022	Menampilkan Infografis APBD Provinsi Riau 2022	Bidang Anggaran Daerah	Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id
8.	Produk Peraturan/ Kebijakan											
8.1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				Selama diberla- kukan	Website bpkad.riau.go.id
8.2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				Selama diberla- kukan	Website bpkad.riau.go.id
8.3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Informasi Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				Selama diberla- kukan	Website bpkad.riau.go.id
8.4.	Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2022	Informasi Surat Edaran Gubernur Riau tentang Pedoman Penyusunan RKA	Bidang Anggaran Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	✓				1 Tahun	Website bpkad.riau.go.id

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menerbitkan dan Menguasai Informasi	Penanggung- jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Publikasi)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia (Cara Pengumuman- an dan Penyediaan Informasi)	Kategori Informasi				Jangka Waktu Penyimp- panan atau Retensi Arsip	Keterangan
							Wajib Di- umun- kan Secara Berlaku	Wajib Di- umun- kan Serta Merta Saad	Wajib Terse- dia	Informasi yang dikuadi- kan (Data Agregat dan Data Priload)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Informasi Standar Layanan Informasi Publik	Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				Selama diberlakukan	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
8.6.	Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				Selama diberlakukan	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
8.7.	Surat Keputusan Standar Pelayanan BPKAD	Informasi Standar Pelayanan BPKAD	Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				Selama diberlakukan	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>
8.8.	Surat Keputusan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) BPKAD Provinsi Riau	Informasi Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) BPKAD Provinsi Riau	Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pekanbaru, 2022	Hardcopy, Softcopy	√				Selama diberlakukan	Website <i>bpkad.riau.go.id</i>

Pekanbaru, Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU.

INDRA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19731115 199803 1 0004